

Oleh :
Peni Susetyorini, S.H., M.H

Abstraksi

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia telah mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional Indonesia sekaligus terus berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dan keamanan dunia baik di tingkat bilateral, regional, dan global.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan Pemerintah NKRI adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemerintah NKRI selama ini telah melaksanakan hubungan dengan berbagai Negara dan organisasi regional maupun internasional.

Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri tersebut di atas melalui forum bilateral maupun multilateral diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah,

atau lembaga-lembaganya, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga Negara Indonesia. Sedangkan politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melaksanakan hubungan dengan Negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, artinya politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipasif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia

berada di tangan Presiden. Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) yang dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Selain itu, Presiden dapat menunjuk pejabat Negara selain Menlu, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu tetapi tetap harus berkoordinasi dengan Menlu.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia (RI) telah mencerminkan diplomasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa guna mencapai kepentingan nasional Indonesia sekaligus terus berperan aktif dalam upaya perwujudan perdamaian dan keamanan dunia baik di tingkat bilateral, regional, dan global.

Pada tataran bilateral, mekanisme hubungan bilateral yang telah dilakukan dengan sejumlah Negara sahabat berhasil meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, khususnya dalam bidang-bidang yang menjadi prioritas kepentingan nasional Indonesia, antara lain perundingan perbatasan, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan peningkatan kerjasama ekonomi.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2014 akan terus ditujukan untuk mengatasi tiga bentuk tantangan utama yang menurut Indonesia dihadapi kawasan Asia Pasifik, yaitu berkurangnya rasa saling percaya,

sengketa wilayah, dan perubahan geopolitik dan geo-ekonomi. Pada intinya, untuk mengubah "trust deficit" menjadi "strategic trust".

Untuk mengesampingkan penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan sengketa wilayah, mencegah kembalinya pola pikir era Perang Dingin, serta mencegah terjadinya jurang pemisah baru antar negara di kawasan, maka prinsip kebijakan politik luar negeri adalah "bebas aktif", memajukan sebuah kawasan yang ditandai oleh "keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium)". Suatu kondisi yang ditandai oleh tidak adanya suatu negara yang dominan, bukan melalui "blockpolitics" yang cenderung menimbulkan ketidakstabilan baru, melainkan melalui hubungan antar negara yang saling menghormati berdasarkan prinsip-prinsip keamanan bersama dan kemakmuran bersama. Bahwa sesungguhnya, keamanan dan kemakmuran yang bersifat langgeng hanya dapat diraih jika dinikmati secara bersama oleh seluruh negara kawasan dan bukan secara sepihak.

Kesemuanya ini hanya akan dapat dicapai jika berhasil mewujudkan Komunitas ASEAN 2015. Mengingat bahwa suatu rasa kebersamaan atau komunitas tidak dapat serta merta diciptakan melalui pengukuhan suatu persetujuan atau kesepakatan, maka sangat penting untuk membangkitkan rasa kepemilikan dan partisipasi, bahkan relevansi ASEAN, di antara masyarakatnya. Pada saat diingatkan akan keterkaitan erat antara perkembangan di tingkat nasional dan kawasan, maka perlu

dipastikan peningkatan kondisi yang kondusif bagi pencapaian Komunitas ASEAN, bukan hanya dalam hubungan antar negara ASEAN, melainkan juga di dalam masing-masing negara anggota ASEAN.

Bahkan, politik luar negeri Indonesia dalam kerangka ASEAN kini menatap jauh pasca 2015, yaitu melalui kontribusi aktif terhadap pembahasan visi Komunitas ASEAN pasca 2015. Bagi Indonesia, visi pasca 2015 tersebut mencakup 4 elemen utama, yaitu:

1. konsolidasi Komunitas ASEAN;
2. kontribusi nyata ASEAN bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan yang lebih luas;
3. peran global ASEAN sesuai dengan Bali Concord III;
4. perumusan apa yang dapat disebut sebagai Tujuan Pembangunan ASEAN (ASEAN Development Goals) yang melanjutkan capaian MDGs serta selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang saat ini sedang dirumuskan di tingkat global.

Dalam hal pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan, apakah melalui ASEAN atau forum lainnya, diplomasi Indonesia sepatutnya tidak akan kenal henti. Perhatian perlu diberikan pada pengelolaan potensi konflik di Laut China Selatan. Perkembangan positif akhir-akhir ini memberikan harapan. Tahun 2013 yang lalu, kita menyaksikan kebangkitan peran penting diplomasi dengan tercapainya kesepakatan antara Tiongkok dan ASEAN untuk memulai konsultasi formal mengenai tata perilaku atau code of conduct di Laut China Selatan. Tidak

diragukan lagi, perundingan tersebut berat untuk dilakukan ke depannya. Namun, Indonesia yakin bahwa dengan kemauan politik yang kuat, suatu kemajuan sangat mungkin terjadi. Salah satunya yaitu tercapainya sebuah tata perilaku di Laut China Selatan yang menjadi "rules of the road" atau panduan yang bertujuan untuk membangkitkan rasa saling percaya, mencegah terjadinya insiden, dan sekalipun insiden tetap terjadi, dapat dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menjadi konflik terbuka.

Sesungguhnya dalam hal tertentu, pengalaman Asia Tenggara, apakah terkait pembangunan komunitas (community building) ataupun pencegahan konflik, relevan bagi kawasan Asia Timur dan Asia-Pasifik yang lebih luas. Misalnya, perkembangan setahun terakhir ini di Laut China Timur dan tentunya, ketegangan yang terus menerus di Semenanjung Korea, mengingatkan kita bahwa Negara-negara di Asia Timur juga membutuhkan peningkatan rasa saling percaya dan penyelesaian perselisihan melalui cara-cara diplomatik yang damai.

Oleh karena itulah, sepanjang tahun lalu, Indonesia telah memulai pembicaraan dengan Negara-negara kawasan mengenai sebuah kerangka kerja sama yang serupa dengan Treaty of Amity and Cooperation yang berlaku di kawasan Asia Tenggara, tetapi kali ini kita peruntukkan bagi kawasan Asia-Pasifik secara lebih luas, atau kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum di antara Negara-negara di kawasan, yang didasari oleh EAS "Bali Principles" for Mutually Beneficial Relations tahun 2011.

Suatu perjanjian mengenai peningkatan rasa saling percaya, penolakan penggunaan kekuatan, dan komitmen terhadap penyelesaian sengketa secara damai, serta prinsip-prinsip keamanan dan kemakmuran bersama. Pada tahun 2014 ini, Indonesia akan melanjutkan upaya mendorong pembahasan hal ini.

Tentunya, tidak ada jaminan bahwa suatu hasil dapat dicapai dalam waktu singkat. Namun, berdiam diri bukan merupakan suatu pilihan. Berdiam diri berarti kawasan kita akan semakin dibayangi oleh ancaman konflik. Indonesia akan terus memanfaatkan segala bentuk kemampuan diplomasinya untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran. Termasuk yang tidak disengaja sebagai akibat dari salah perhitungan. bahkan, cara pandang seperti ini tidak hanya terbatas pada kawasan Asia Pasifik. Sebagai suatu kekuatan kawasan dengan kepentingan global, Indonesia akan senantiasa menyuarkan penggunaan diplomasi dalam menyikapi sengketa dan situasi konflik di berbagai belahan dunia.

Pada tahun 2013 yang lalu, upaya diplomasi dapat membuahkan hasil yang nyata, seperti dalam penanganan isu senjata kimia di Suriah dan juga perundingan 5+1 dengan Republik Islam Iran. Pada tahun 2014 ini, Indonesia kembali akan mendorong penyelesaian diplomatik atas konflik di Suriah dan situasi konflik serupa lainnya serta tentunya dalam mewujudkan hak-hak sah bangsa Palestina yang sudah terlalu lama tertunda.

Terkait Palestina, tahun ini akan ditandai oleh penguatan dukungan

Indonesia terhadap Palestina antara lain melalui dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diupayakan melalui New Asia-Africa Strategic Partnership periode 2008 Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD). Selain itu, dengan menjadi tuan rumah Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD), Indonesia akan menggalang dukungan serupa dari Negara-negara Asia Timur.

Pendekatan diplomasi juga diterapkan dalam menghadapi keterkaitan yang erat antara masalah politik keamanan di satu sisi dengan masalah sosial ekonomi di sisi lain, serta keterkaitan antara masalah nasional, bilateral, regional, dan global. Salah satu wujud nyata adalah dalam penerapan diplomasi ekonomi. Sebagai contoh, pada tahun 2013, diplomasi Indonesia telah memberikan kontribusi nyata terhadap agenda Pembangunan pasca 2015, melalui peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai salah satu co-chair dari UN High Level Panel of Eminent Persons, melalui Keketuaan Indonesia pada APEC 2013, melalui Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali, melalui kontribusi pada Pertemuan Puncak G-20 di St. Petersburg serta forum multilateral ekonomi lainnya, dan tentunya, melalui upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral dengan berbagai negara sahabat. juga, kebijakan politik luar negeri Indonesia telah secara aktif mendekatkan hubungan antar kawasan, termasuk antara Asia dan Eropa, misalnya melalui ASEM dan dalam kerangka hubungan ASEAN-EU, dan juga

antara Asia Timur dengan Amerika Latin, melalui pertemuan FEALAC dimana Indonesia menjadi co-chair dan sekaligus tuan rumah pada tahun 2013. Politik luar negeri Indonesia juga telah mewujudkan tekadnya untuk meningkatkan kerjasama antar Negara-negara di kawasan Samudera Hindia melalui IORA, serta Negara-negara Pasifik Barat Daya baik melalui PIF, MSG, maupun peningkatan hubungan bilateral.

Tentunya, tahun ini juga akan ditandai penguatan diplomasi ekonomi Indonesia secara bilateral, regional, antar kawasan dan global. Kesemuanya bertujuan untuk memastikan kontribusi diplomasi terhadap pembangunan perekonomian nasional.

Perkembangan sepanjang tahun 2013 juga mengingatkan kita tentang adanya keterkaitan erat perkembangan masalah dalam negeri suatu negara dan situasi di kawasannya. Perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, dan bagian lain dari benua Afrika menjadi contoh nyata. Suatu contoh bagaimana perdamaian dan keamanan antar negara dapat terancam oleh perkembangan dalam negeri suatu negara.

Politik luar negeri Indonesia pada tahun 2014 akan terus memberikan tanggapan yang terukur terhadap realita tersebut, yaitu realita bahwa masalah internal dan eksternal memiliki keterkaitan yang erat. Konsolidasi terus menerus Bali Democracy Forum, sebagai forum yang penting bagi negara-negara di Asia-Pasifik, bahkan kini di luar kawasan, untuk saling berbagi pengalaman tentang demokrasi. Demikian pula dengan

kelembagaan hak asasi manusia ASEAN yang akan terus diperkuat, terutama melalui ASEAN Inter-Governmental Commission for Human Rights (AICHR). Relevan dan terkait dengan hal ini, pada bulan Agustus, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan ke-6 dari United Nations Alliance of Civilizations (Aliansi Peradaban), yaitu suatu kerja sama global yang mengedepankan nilai-nilai dialog dan kerukunan di antara berbagai peradaban dunia. Penyelenggaraan Alliance of Civilizations yang pertama kali di kawasan Asia Pasifik ini akan mengusung tema "Unity in Diversity". Diplomasi juga akan dikedepankan dalam penanganan berbagai isu yang penanganannya memerlukan kerja sama internasional, seperti keamanan pangan, keamanan energi, keberlanjutan lingkungan, bencana alam, dan juga kejahatan transnasional seperti terorisme maupun perdagangan dan penyelundupan manusia.

Keterkaitan antara masalah domestik dan internasional juga tampak jelas dalam penanganan isu perlindungan warga Negara. Tahun yang silam menunjukkan semakin kompleks dan bervariasinya situasi yang memerlukan diberikannya perlindungan terhadap warga negara kita di luar negeri, mulai dari kondisi kerja hingga terhadap instabilitas politik dan bencana alam.

Pada tahun 2013 misalnya, tidak kurang dari 40.236 warga Negara Indonesia di luar negeri telah dilindungi kembali ke tanah air. Tekad untuk terus memperkuat upaya perlindungan warga Indonesia di luar negeri dengan

memfokuskan diri pada tiga pendekatan yang saling terkait: pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan. Permasalahan di tahun mendatang, sebagaimana tahun lalu, tentunya akan dipenuhi dengan berbagai tantangan dan ketidakpastian. Namun, politik luar negeri Indonesia menyongsong tahun ini dengan penuh harapan. Indonesia akan senantiasa menempatkan diplomasi dan dialog sebagai pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan dalam melindungi dan memajukan kepentingan nasionalnya, dan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

PENUTUP

Masyarakat internasional terus menghadapi berbagai tantangan serius seperti masih belum pulihnya sebagian perekonomian global dari krisis keuangan dan ekonomi, ancaman pandemik global, serta tantangan perubahan iklim. Semua itu bersifat multidimensional dan terjadi secara bersamaan. Gabungan dari tantangan yang bersifat tradisional dan non-tradisional, lama dan baru, merupakan kenyataan yang dihadapi dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Karakter lintas batas dan global dari berbagai tantangan ini mengharuskan diplomasi Indonesia untuk mengedepankan kerjasama internasional baik di tataran bilateral, regional, maupun multilateral untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Kebijakan luar negeri Indonesia secara aktif berupaya meningkatkan ke tataran yang lebih tinggi dalam hubungan yang telah terjalin dengan Negara-negara

di seluruh dunia. Promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri membawa sumbangan nyata bagi pembangunan nasional.

Di tingkat regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, Indonesia senantiasa menunjukkan kepemimpinan. Dengan semakin dekatnya target waktu perwujudan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang akan datang, Indonesia selalu berupaya untuk memastikan agar ASEAN dalam jalur yang tepat dalam pencapaian tugas pilar komunitas ASEAN.

Politik luar negeri Indonesia secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai bagian dari penyelesaian masalah berbagai tantangan global, sebagai suatu Negara yang mengedepankan titik temu dan bukannya mempertentangkan berbagai kepentingan yang ada.

Daftar Pustaka

1. Diplomasi Indonesia 2011
2. Diplomasi Indonesia 2013
3. Himpunan Perundangan-undangan Tentang Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI
4. Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI Tahun 2012, Jakarta 7 Januari 2014
5. Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI Tahun 2014, Jakarta 7 Januari 2012

Biodata Penulis

1. Nama : Peni Susetyorini, S.H., M.H.
2. Tempat & Tanggal lahir : Semarang, 12 September 1968
3. NIP : 196809121994032001
4. Golongan/Pangkat : Penata Tingkat I/III D
5. Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
6. Jabatan Struktural : Ketua Bagian Hukum Internasional
7. Fakultas : Hukum
8. Jurusan : Bagian Hukum Internasional
9. Bidang Minat/Kepakaran : Hukum Internasional, Hk. Diplomati & Konsuler, Hk. Laut Internasional
10. Alamat Kantor/ Telepon : Jl. Prof. Sudarto Tembalang Semarang
: (024) 76918201 fax: 024 76918206
11. Alamat Rumah/Telepon/HP : Jl Karonsih Timur I/410 Semarang
: (024) 7623378 / HP 081326129098
12. Alamat weblog/email : PeniSusetyorini@undip.ac.id
penifhundip@yahoo.co.id

Catatan Akhir

- Pasal 1 UU No. 37/1999 Tentang Hubungan Luar negeri
- Ibid Pasal 2
- Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI Tahun 2014, Jakarta 7 Januari 2014
- Loc.cit
- Loc.cit